



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pemprov Dapat Surat Peringatan

Bakal Ada Pemanggilan dari Kemendagri

JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin menyebutkan, DKI Jakarta akan dikirim surat peringatan. Pasalnya, tidak menyelesaikan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 tepat waktu pada 30 November 2019 lalu.

Hal tersebut bakal dilayangkan pada Senin (9/12/2019). "Paling enggak minggu depan kami sudah harus menyurat mengingatkan yang belum. Rencana kita artinya kita sudah tahu betul yang akan terlambat. Mulai Senin. Kami sudah siapkan surat-suratnya, tapi tidak realistis kalau ditegur sekarang," ucap dia

Kami sudah siapkan surat-suratnya, tapi tidak realistis kalau ditegur sekarang".

Syarifuddin

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri

saat dihubungi INDOPOS, Selasa (3/12/2019).

Selain Jakarta, sambung Syarifuddin, kemungkinan ada 10 provinsi lain yang juga akan diberi peringatan karena tidak tepat waktu menyelesaikan pembahasan RAPBD 2020 ■

"Secara administrasi seharusnya itu sudah perlu kami ingatkan. Itu semacam peringatan saja teguran bahwa 'hey ayo cepat-cepat jangan sampai alot-alot nanti melampaui 31 Desember'," kata dia.

Ia menambahkan, pada Rabu (4/12/2019), Kemendagri akan memeriksa dokumen RAPBD bagi provinsi yang sudah mengirim ke Kemendagri. Dokumen RAPBD baru bisa diperiksa Rabu karena terhitung tiga hari kerja dari tanggal 30 November 2019 atau tanggal terakhir pengiriman dokumen.

"Bisa tanggal 4 atau 5 karena hari kerja. Karena tanggal 1 kan libur. Nah ini kita lihat sampai tanggal 4 besok. Kan 3 hari baru dikirim makanya kami lihat dokumennya disetujui kapan," tutur Syarifuddin.

Sementara, Pemrov DKI Jakarta akhirnya mengunggah RAPBD DKI tahun 2020 ke situs web apbd.jakarta.go.id. Terlihat ada tiga dokumen rancangan anggaran 2020 yang diunggah. Pertama, dokumen berjudul 'RKPD Finalisasi Prioritas Kegiatan' senilai Rp93 triliun.

RKPD merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi cikal bakal Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Sementara dokumen yang kedua berjudul 'KUA dan PPAS Input dan Supervisi Kegiatan KUA dan PPAS Hasil Pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD'. Nilainya sebesar Rp87,956 triliun, sesuai yang disepakati dengan DPRD DKI Jakarta pada Kamis (28/11/2019) lalu.

Dokumen terakhir diberi judul 'RAPBD Input Penyempurnaan RKA RAPBD 2020' yang nilainya sama dengan KUA-PPAS. RAPBD tersebut disusun berdasarkan KUA-PPAS yang telah disepakati pihak eksekutif dan legislatif.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta Suharti sebelumnya memang mengatakan, rancangan anggaran DKI tahun 2020 akan diunggah ke situs web tersebut bertepatan dengan diusulkannya RAPBD 2020. "Harusnya sudah selesai (diunggah-red) besok (hari ini-red)," tutur Suharti.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyerahkan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020 senilai Rp87,95 triliun. Penyerahan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Nilai RAPBD DKI yang diusulkan Pemrov DKI tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,22 persen dari nilai APBD DKI 2019 yang mencapai Rp86,89 triliun. Gubernur Anies Bas-

wedan memaparkan dalam pidatonya, mengenai Kebijakan Umum dalam RAPBD DKI Jakarta 2020 yang meliputi kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Menurut Anies, APBD DKI Jakarta 2020 tetap difokuskan pada implementasi program-program strategis yang dirincikan dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD). KSD ini disusun sebagai pelaksanaan RPJMD 2017-2022 untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi program-program strategis yang kita sebut juga sebagai KSD itu akan terus kita laksanakan di 2020. Kita bersyukur, beberapa program strategis itu disepakati bersama dengan baik, termasuk misalnya terkait dengan air dan lain-lain. Jadi kita berharap semua KSD, Kegiatan Strategis Daerah yang itu adalah terjemahan dari RPJMD 2017-2022 nanti bisa dilaksanakan (secara berkesinambungan)," kata Anies.

Dia juga mengatakan, kebijakan pendapatan daerah diarahkan melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Di antaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan retribusi daerah serta kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan daerah juga didapatkan melalui pengelolaan dana perimbangan, yang difokuskan pada percepatan penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat. "Dana perimbangan mengalami sedikit peningkatan, khususnya dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Sementara itu Dana Bagi Hasil mengalami penurunan. Penurunan ini memperkuat argumentasi perlunya Pemerintah

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pemprov Dapat Surat Peringatan

DKI Jakarta untuk meningkatkan PAD," terang Anies.

Kemudian, pendapatan daerah juga didapatkan dari peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang difokuskan pada koordinasi pencairan hibah MRT sesuai Naskah Perjanjian Pemberian Hibah (NPPH) dan hibah dari Jasa Raharja.

Anies mengatakan, pendapatan daerah pada 2020 direncanakan sebesar Rp82,19 triliun atau meningkat 9,60 persen dibandingkan perubahan APBD DKI 2019 sebesar Rp74,99 triliun. Rencana pendapatan daerah tersebut diharapkan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp57,56 triliun; dana perimbangan sebesar Rp21,61 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3,01 triliun.

Melihat dari proyeksi nilai PAD 2020, untuk sektor pendapatan, DKI masih sangat bergantung pada PAD yang mencapai sekitar 70 persen dari total nilai proyeksi pendapatan daerah 2020. Sedangkan 30 persen lagi ditutupi dari sektor pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Anies mengungkapkan, ren-

cana PAD DKI 2020 diharapkan diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp50,17 triliun, retribusi daerah sebesar Rp755,75 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp750,00 miliar, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp5,88 triliun.

Dengan kata lain, pendapatan DKI sangat bergantung pada perolehan sektor pajak daerah yang menguasai proyeksi PAD DKI 2020 sebesar 87,1 persen. Sedangkan sisanya, 12,8 persen diharapkan diperoleh dari tiga sektor PAD lainnya.

"Sedangkan untuk dana perimbangan sebesar Rp21,61 triliun. Berasal dari dana bagi hasil sebesar Rp17,82 triliun, serta dana alokasi khusus sebesar Rp3,79 triliun," papar Anies. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3,01 triliun. Berasal dari pendapatan hibah sebesar Rp 2,95 triliun, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp62,61 miliar. (aen/dni)